

CAKRAWALA PENDIDIKAN

**FORUM KOMUNIKASI ILMIAH
DAN EKSPRESI KREATIF
ILMU PENDIDIKAN**

Membumikan Model Lesson Study Berbasis Sekolah
dalam Upaya Mengembangkan Kompetensi Guru

To Minimize Errors in Speech Production

Teaching Listening Using Web Based Materials

Pentingnya Budaya Disiplin dalam Perkuliahan

Peningkatan Modal Sosial sebagai Solusi Cerdas Pengentasan Kemiskinan

Model Isu Kontroversial dalam Pembelajaran PKn
sebagai Solusi Meningkatkan Ketrampilan Berfikir Kritis Siswa

Effect of Emotional Quotient, Spiritual Quotient, and Quality
of Work Life of Performance

Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
untuk Meningkatkan Kreatifitas dan Hasil Belajar

Memahamkan Operasi Pecahan melalui Penerapan Grup Investigasi

Analisis Kinerja Karyawan Ditinjau dari Etos Kerja
dan Motivasi Berprestasi pada Karyawan

Linguistic Aspect in HCG Ultra Users' Comments

An Analysis on the Content Validity Of National English Test
on Reading 2011 for Senior High School

Penerapan Metode The Power of Two
untuk Meningkatkan Kemampuan Belajar Kolaborasi

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Mahasiswa

Pembelajaran Matematika dengan Media Pohon Matematika
pada Materi Operasi Hitung Bilangan Bulat

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober

Terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting

Kadeni

Wakil Ketua Penyunting

Syaiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana

R. Hendro Prasetianto

Udin Erawanto

Riki Suliana

Prawoto

Penyunting Ahli

Miranu Triantoro

Masruri

Karyati

Nurhadi

Pelaksana Tata Usaha

Yunus

Nandir

Sunardi

Alamat Penerbit/Redaksi: STKIP PGRI Blitar, Jalan Kalimantan No. 111 Blitar, Telepon (0342)801493. Langganan 2 nomor setahun Rp 50.000,00 ditambah ongkos kirim Rp 5.000,00. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar. **Ketua:** Dra. Hj. Karyati, M.Si, **Pembantu Ketua:** M. Khafid Irsyadi, ST, S.Pd

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

Petunjuk Penulisan Cakrawala Pendidikan

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang 10–20 halaman, dan diserahkan paling lambat 3 bulan sebelum penerbitan, dalam bentuk ketikan di atas kertas sebanyak 2 eksemplar dan pada disket komputer IBM PC atau kompatibel. Berkas naskah pada disket komputer diketik dengan menggunakan pengolah kata *Microsoft Word*.
2. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepastakaan, dan tinjauan buku baru.
3. Semua karangan ditulis dalam bentuk *esai*, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, letaknya rata tepi kiri halaman, dan tidak menggunakan nomor angka, sebagai berikut.

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA TEBAL, RATA TEPI KIRI)

Peringkat 2 (Huruf Besar-kecil Tebal, Rata Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar-kecil Tebal, Miring, Rata Tepi Kiri)

4. Artikel konseptual meliputi (a) judul, (b) nama penulis, (c) abstrak (50–75 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (g) isi/pembahasan (terbagi atas sub-subjudul), (h) penutup, dan (i) daftar rujukan. Artikel hasil penelitian disajikan dengan sistematika: (a) judul, (b) nama (-nama) peneliti, (c) abstrak, (d) kata kunci, (e) identitas peneliti (tanpa gelar akademik) (f) pendahuluan berisi pembahasan kepastakaan dan tujuan penelitian, (g) metode, (h) hasil, (i) pembahasan, (j) kesimpulan dan saran, dan (k) daftar rujukan.
5. Daftar rujukan disajikan mengikuti tatacara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Anderson, D.W., Vault, V.D., dan Dickson, C.E. 1993. *Problems and Prospects for the Decades Ahead: Competency Based Teacher Education*. Berkeley: McCutchan Publishing Co.

Huda, N. 1991. *Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal*. Makalah disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP MALANG, Malang, 12 Juli.

Prawoto. 1988. *Pengaruh Penginformasian Tujuan Pembelajaran dalam Modul terhadap Hasil Belajar Siswa SD PAMONG Kelas Jauh*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: FPS IKIP MALANG.

Russel, T. 1993. An Alternative Conception: Representing Representation. Dalam P.J. Black & A. Lucas (Eds.). *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London: Routledge.

Sihombing, U. 2003. *Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. <http://www.puskur.or.id>. Diakses 21 April 2006

Zainuddin, M.H. 1999. Meningkatkan Mutu Profesi Keguruan Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 1(1):45–52.

6. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (Depdikbud, 1987).

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan
 Volume 14, Nomor 2, Oktober 2012

Daftar Isi

Membumikan Model Lesson Study Berbasis Sekolah dalam Upaya Mengembangkan Kompetensi Guru	111
<i>Ekbal Santoso</i>	
To Minimize Errors in Speech Production	120
<i>Feri Huda</i>	
Teaching Listening Using Web Based Materials	128
<i>M Ali Mulhuda</i>	
Pentingnya Budaya Disiplin dalam Perkuliahan	136
<i>Masruri</i>	
Peningkatan Modal Sosial sebagai Solusi Cerdas Pengentasan Kemiskinan	139
<i>Miranu Triantoro</i>	
Model Isu Kontroversial dalam Pembelajaran PKn sebagai Solusi Meningkatkan Ketrampilan Berfikir Kritis Siswa	146
<i>Udin Erawanto</i>	
Effect of Emotional Quotient, Spiritual Quotient, and Quality of Work Life of Performance	155
<i>Kadeni</i>	
Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Kreatifitas dan Hasil Belajar	169
<i>Karyati</i>	
Memahami Operasi Pecahan melalui Penerapan Grup Investigasi	177
<i>Mohamad Khafid Irsyadi</i>	
Analisis Kinerja Karyawan Ditinjau dari Etos Kerja dan Motivasi Berprestasi pada Karyawan	188
<i>Ninik Srijani</i>	
Linguistic Aspect in HCG Ultra Users' Comments	196
<i>Rainerius Hendro Prasetyanto</i>	
An Analysis on the Content Validity Of National English Test on Reading 2011 for Senior High School.	205
<i>Saiful Rifa'i</i>	
Penerapan Metode The Power of Two untuk Meningkatkan Kemampuan Belajar Kolaborasi ..	219
<i>Sudjianto</i>	
Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Mahasiswa ...	230
<i>Suryanti</i>	
Pembelajaran Matematika dengan Media Pohon Matematika pada Materi Operasi Hitung Bilangan Bulat	237
<i>Wahid Ibnu Zaman</i>	

PENINGKATAN MODAL SOSIAL SEBAGAI SOLUSI CERDAS PENGENTASAN KEMISKINAN

Miranu Triantoro
STKIP PGRI Blitar
mir.stkip@gmail.com

Abstrak: Kemiskinan merupakan sebuah problematika nyata yang dihadapi oleh masyarakat di sebuah negara bangsa, oleh karena itu diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat untuk bertanggungjawab dalam sebuah program pengentasan. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kemiskinan, baik yang bersifat intern maupun ekstern, sehingga diperlukan program dan pendekatan yang benar-benar relevan dengan kasus yang ada. Modal Sosial yang berupa seperangkat daya yang bersandar pada nilai-nilai sosial masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan untuk sarana pengentasan kemiskinan, karena dengan nilai-nilai itu dapat dibangun dan ditumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat, kerjasama dan jaringan sosial yang mampu membangkitkan dan memotivasi seseorang untuk bangkit dari keterpurukannya menuju tataran kehidupan yang lebih layak

Kata kunci: modal sosial, kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah sebuah fenomena sosial yang dapat dilihat dan terjadi di seluruh tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, karena itu kemiskinan akan terjadi dimana saja, sekalipun pada suatu negara yang maju. Hanya saja yang membedakan adalah pada segi jumlah, baik secara absolut maupun secara proporsional dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu ketika saya mendapatkan tawaran dari panitia untuk berbicara masalah kemiskinan muncul berbagai pertanyaan “Apakah ini tidak latah?”, Bukankah sudah banyak para pakar yang membicarakannya dan bahkan hasil-hasilnya sudah dipublikasikan? Kalau demikian halnya adakah yang tersisa untuk saya lakukan?

Pertanyaan mendasar semacam itu, paling tidak menurut pemahaman saya, rasanya wajar, karena dalam kenyataannya memang sudah banyak berbagai pandangan dan temuan di sekitar permasalahan kemiskinan, meskipun sebenarnya orang yang “meributkan” masalah kemiskinan

justu berasal dari luar orang-orang yang miskin. Misalnya dari para ekonom, pemimpin partai politik, pemimpin masyarakat, agamawan, para pekerja sosial, LSM, kalangan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Orang-orang yang miskin ada kecenderungan tidak meributkan nasib mereka sendiri, mereka tidak pusing dengan kemiskinan yang dialaminya dan tenang-tenang saja selama kehidupan mereka tidak diganggu.

Walaupun dalam kenyataannya orang-orang miskin tersebut tidak pernah mempermasalahkannya sendiri, akan tetapi kemiskinan tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak wajar dan tidak manusiawi. Oleh karena itu kemiskinan itu tetap harus dipermasalahkan oleh mereka yang memiliki kewenangan dan diupayakan untuk dihilangkan. Mereka yang memiliki berbagai macam kelebihan (ilmu pengetahuan, kekuasaan, rezeki) harus berusaha bersama-sama untuk menghilangkan adanya ketidakwajaran dan ketidakmanusiawian tersebut, sebab orang-orang miskin tidak akan mampu untuk memecahkan

permasalahannya sendiri.

Mendasarkan pada pemikiran itulah, maka pengentasan kemiskinan merupakan bagian integral dari perjuangan seluruh rakyat/bangsa di Indonesia.

FENOMENA KEMISKINAN DI INDONESIA, KHUSUSNYA DI JAWA TIMUR

Problematika kemiskinan di Indonesia, sebenarnya bukan sesuatu fenomena baru dalam tataran kehidupan sosial ekonomi masyarakat kita. Sebagai sebuah negara yang berkembang, Indonesia senantiasa berbenah diri dengan segala cara dalam rangka mensejahterakan rakyatnya, dengan melakukan perubahan-perubahan kebijaksanaan dalam rangka menuju negara maju yang salah satunya ditandai dengan berkurangnya kemiskinan. Demikian juga dengan Jawa Timur sebagai salah satu Propinsi yang jumlah penduduk miskinnya masih tinggi, berusaha untuk memfokuskan APBD tahun 2010 pada program Kerakyatan, khususnya diperuntukkan bagi penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pemberian layanan dasar masyarakat serta pembangunan infrastruktur daerah terpencil. Dan yang sangat menarik adalah bahwa salah satu strategi yang diterapkan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran bukan lagi berupa bantuan murni, akan tetapi bantuan hibah alat produksi pertanian dsb.

Upaya untuk melakukan pengentasan terhadap kemiskinan, memang bukanlah sesuatu yang mudah, karena penyebab kemiskinan itu sendiri melibatkan berbagai faktor yang pelik dan kompleks untuk diatasi. Menurut Robert Chambers, ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di pedesaan, diantaranya adalah (1) ketidak berdayaan, (2) keterasingan (3) kerawanan dan (4) kelemahan fisik.

Berbeda dengan pendapat tersebut di atas Wilber, secara lebih terinci membedakan penyebab kemiskinan pada domain kawasan dan masyarakat dengan kemiskinan pada individu. Penyebab kemiskinan pada kawasan dan masyarakat ditandai dengan hal-hal sebagai berikut: (1) Sumber daya alam, yang bercirikan adanya kehabisan, ketiadaan dan pemborosan, (2) Kebijakan Negara, dicirikan oleh tidak terpenuhinya

kebutuhan kesejahteraan kaum miskin, (3) Sistem ekonomi, dicirikan oleh ketidak mampuan memperoleh atau menukarkan barang-barang atau jasa; ketimpangan pemilikan atau pengelolaan kontrol, besarnya kelompok berpendapatan rendah, pengangguran dan bertaraf hidup rendah, (4) Norma sosial, yang dicirikan oleh deprivasi dan pemberontakan terhadap norma, (5) Stratifikasi, yang dicirikan oleh banyaknya orang tanpa mobilitas dan berstatus rendah, (6) Kemudahan dan layanan masyarakat, yang dicirikan oleh kelangkaan kepemimpinan dan organisasi, ketiadaan layanan kemudahan tepat-guna, (7) Media massa, yang dicirikan oleh banyaknya penduduk yang tidak mendapatkan informasi.

Sedangkan dalam pandangan individual, kemiskinan itu ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dari segi kesehatan, dicirikan oleh kecacatan, baik fisik maupun mental, berpenyakit/luka
2. Kemampuan; dicirikan oleh tingkat pendidikan/latihan yang rendah, pengangguran atau setengah pengangguran dan berpenghasilan rendah
3. motivasi; dicirikan oleh banyaknya rintangan untuk mencapai tujuan, derajat tujuan yang rendah, dan keputusan dalam berusaha
4. Kepribadian, dicirikan oleh kegagalan dalam sosialisasi, anti sosial dan keterasingan sosial
5. Status sosial, sosial ekonomi; dicirikan oleh rendahnya mobilitas sosial dan rendahnya status sosial ekonomi.

Terlepas dari makna kemiskinan yang terus bergeser seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, maka langkah mendasar yang perlu ditempuh adalah melakukan pendataan yang valid mengenai data-data penduduk miskin, baik yang berkenaan dengan wilayah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dan juga keluarga miskin dengan berbagai problema yang dihadapinya. Hal ini cukup logis, karena tanpa didasari adanya data yang valid, maka upaya untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan akan tidak memenuhi sasaran, dan yang lebih celaka lagi bisa berubah menjadi sebuah penetasan kemiskinan baru.

Cobalah kita simak data penduduk miskin (khusus di Jawa Timur) yang telah saya peroleh dari sumber yang berbeda berikut ini:

- a. Menurut DPD LPM (Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Jawa Timur yang disampaikan pada saat Semiloka dan temu LPM seluruh Jawa Timur di Taman Krida Budaya Malang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010, jumlah Penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 4,8 Juta dari total jumlah penduduk sebesar 37, 8 jiwa .
- b. Menurut Berita Resmi Statistik (Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur periode Maret 2010 sebesar 5,529,31 juta (15,26 persen) dengan perbandingan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 1,873,55 juta dan di daerah pedesaan sebesar 3,655,76 juta;

Perbedaan jumlah data tersebut memberi gambaran kepada kita, bahwa kriteria yang dijadikan patokan untuk menentukan miskin tidaknya seseorang masih perlu pengkajian ulang dan sinkronisasi dari berbagai pihak baik pemerintah maupun pihak-pihak swasta pemerhati kemiskinan, sehingga ada indikator yang jelas dan tidak menimbulkan satah tafsir .

Dari berbagai pendekatan dan pendapat yang telah disampaikan oleh berbagai pihak (misalnya Bank Dunia, Bappenas, Badan Pusat Statistik, BKKBN dan lain sebagainya) kita dapat mengembangkan berbagai indikator yang ada untuk menjadi kesepakatan bersama dalam menentukan miskin/tidaknya seseorang, diantaranya adalah: (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak, (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif. (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis, (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup, (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (letakberdayaan datau daya tawar rendah (6), lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah, (7) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya alangsungv maupun tidak langsung (8) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam, (9) lemahnya

jaminan rasa aman; (10) Lemahnya partisipasi (11), besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggunga keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. (12) terbatasnya akses terhadap air bersih, (13) Tata kelola pemerintahan yang buruk akan menyebabkan inefisiensi dan inefektifitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masalah.

Dengan mencermati fakta/data kondisi Kemiskinan di Jawa Timur (periode bulan Maret 2010) tersebut di atas, maka apabila dilihat secara kuantitatif jumlah penduduk miskin di Jatim menurun dibandingkan dengan tahun 2009, dimana penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 5,529 juta (15,26 %) yang pada tahun sebelumnya sebesar 6.022 juta (16,68%), dengan rincian penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 218,32 ribu dan daerah perkotaan berkurang 274,97 ribu. (<http://Jatim.bps.go.id>)

Terlepas dari valid atau tidaknya instrumen yang digunakan untuk mengukur miskin tidaknya seseorang, maka sudah terdapat penurunan yang cukup berarti, akan tetapi jangan membuat kita yang hadir disini berbangga dan berpuas diri, 5,529 juta jiwa bukan merupakan jumlah yang sedikit, sungguh hal ini merupakan beban sekaligus tantangan berat bagi pembangunan yang harus ditanggung oleh Pemerintah bersama-sama masyarakat untuk mengentaskannya

MODAL SOSIAL SEBAGAI SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN

Dengan memperhatikan fenomena kemiskinan di Indonesia yang bersifat pelik dan kompleks, karena lahir dari beberapa faktor penyebab (tidak hanya sekedar issue ekonomi tetapi juga persoalan politik dan sosial budaya), maka sistem penanggulangannyapun harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh departemen dan elemen-elemen masyarakat yang terkait. Tidak hanya sekedar mempergunakan pendekatan ekonomi yang hanya bersifat kuratif.

Salah satu pendekatan yang dapat kita pergunakan adalah dengan mengembangkan Modal Sosial yang sudah dimiliki dan inherent pada masyarakat, sehingga dapat memunculkan

semangat dan jati dirinya untuk bangkit dan berkembang dari keterpurukan keadaan (kemiskinan) menuju kepada kehidupan yang lebih layak.

Makna Modal Sosial

Istilah “Modal Sosial” atau “social capital” (yang marak dibicarakan setelah adanya KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen 12 Maret 1995) pada dasarnya dapat dimaknai sebagai modal yang dimiliki oleh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat baik yang bersifat material (terkait asset-asset finansial yang dimiliki) maupun non material (nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan oleh sebagian besar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan sebuah komunitas.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat sendiri menurut Gunawan Sumodiningrat (dalam Ahmad, 2005, 13) mengandung tiga makna, yaitu (1) upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu; sehingga mereka harus dikenalkan terhadap daya atau potensi yang harus dikembangkan (2) upaya untuk memberi daya atau kekuatan kepada masyarakat, sehingga diperlukan langkah-langkah positif dan nyata; penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat makin berdaya dalam memanfaatkan peluang yang ada; dan (3) upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya..

Dengan demikian maka modal sosial sebenarnya tidak hanya sekedar pengembangan jaringan hubungan antara komponen kepercayaan (*trust*), jaringan hubungan kerja (*network*) dan kerjasama (*Cooperative*) sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar. Akan tetapi merupakan sebuah nilai, mekanisme, sikap dan institusi yang mendasari interaksi antar individu yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Artinya bagaimana sebuah tata nilai yang ada di masyarakat tersebut dikembangkan; bagaimana mekanisme hubungan antara individu dibangun, sikap positif dan progresif

masyarakat dibangkitkan dan sebuah institusi dibangun menuju kepada tata kelola yang baik (*Good Governance*)

Rasionalisasi Pengembangan/Peningkatan Modal Sosial

Sebagai salah satu jenis modal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, maka modal sosial yang lebih menekankan kepada potensi kelompok dan pola hubungan antar individu, tidak kalah produktifnya jika dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya yang lain (misalnya modal alam/natural capital; financial capital/modal ekonomi, dst). Melalui modal sosial tingkat kepercayaan masyarakat dibangun; norma-norma moral masyarakat dijadikan panutan dan pegangan dan jaringan-jaringan kerja ditumbuhkan dalam rangka mencapai tujuan bersama

Berdasarkan konsep pemikiran tersebut di atas, setidaknya ada beberapa faktor yang secara rasional dapat dijadikan sebagai argumen pengembangan modal sosial sebagai solusi pengentasan kemiskinan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Modal sosial memberikan pencerahan tentang makna kepercayaan, kebersamaan, toleransi dan partisipasi sebagai sebuah pilar penting dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat yang dilakukan melalui sebuah pemberdayaan, tidak akan dapat terlaksana dengan baik manakala tidak ditumbuhkan kesadaran dan rasa percaya diri di kalangan para anggota masyarakat. Melalui sebuah kerjasama yang abai, sikap yang saling asih, asah dan asuh yang ditandai dengan keikutsertaannya secara aktif, maka keberhasilan akan dicapai dengan baik, akan tetapi sebaliknya apabila para anggota masyarakat tidak memiliki kepercayaan diri, kebersamaan dan peran sertanya, maka sulit untuk mencapai sebuah keberhasilan, dan bahkan akan senantiasa mencari alasan pembenaran akan kegagalannya.
2. Modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan akan tetapi malah semakin meningkat. Berbeda dengan modal finansial maupun modal natural/sumber daya alam yang

dapat rusak atau habis, maka modal sosial tidak akan pernah habis dan bahkan dapat meningkat, karena modal sosial bersumber pada nilai-nilai dan norma bersama yang telah disepakati, sehingga dengan semakin banyak memiliki pengalaman dan jaringan sosial, maka akan memudahkan tercapainya tujuan bersama.

3. Modal sosial dapat memelihara norma-norma sosial dalam suatu komunitas dan mengurangi kecenderungan perilaku egois diantara anggota kelompok. Artinya orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan komunitasnya dan mempunyai hubungan saling mempercayai, pada umumnya memiliki perilaku yang dapat diterima oleh kelompoknya.

UPAYA MENINGKATKAN MODAL SOSIAL SEBAGAI SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN

Sebagai sebuah modal yang bersumber pada tatanan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, yang diharapkan mampu untuk membangkitkan tingkat kepercayaan sekaligus mengembangkan jaringan-jaringan sosial untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kerjasama, saling menghargai dan menguntungkan, maka paling tidak ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh komponen bangsa ini, diantaranya adalah:

Melakukan perubahan terhadap Mindset dan cultural set

Melakukan perubahan terhadap Mindset dan cultural set ini tidaklah mudah, karena terkait dengan pola kehidupan anggota masyarakat, namun demikian penggunaan modal sosial ini tidak akan berarti jika tidak diawali dengan upaya perubahan terhadap pola pikir dan budaya masyarakat kita.

Untuk melakukan terhadap perubahan pola pikir (Mindset) dapat dilakukan dengan cara (1) menanamkan rasa ikut bertanggungjawab (sense of responsibility) (2) menanamkan rasa ikut memiliki, (sense of belongingness) (3) menanamkan rasa ikut memikirkan (sense of reasoning), dan (4) ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara (follow to participate in de-

velopment)

Sedangkan untuk melakukan perubahan terhadap budaya masyarakat (cultural set) seseorang harus mengetahui sikap mental dari masyarakat yang ingin dirubah. Menurut Mochtar Lubis ada beberapa ciri manusia Indonesia, yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ciri-ciri yang bersifat Umum (1 s.d 5); ciri-ciri yang bersifat buruk/jelek (6 s.d 15) dan ciri-ciri yang bersifat baik (16 s.d 19). Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Hipokrit atau munafik, (2) Segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, (3) Berjiwa feodal, (4) Masih percaya takhayul (5) Artistik, karena dekat dengan alam. (6) Tidak hemat (boros), (7) Senang berpakaian bagus dan berpesta, (8) Lebih suka tidak bekerja keras, kecuali terpaksa, (9) Ingin menjadi miliuner seketika (Instan), (10) Cenderung kurang sabar, (11) Tukang menggerutu, (12) Cepat dengki, (13) Gampang senang dan bangga pada hal-hal yang hampa, (14) Bisa kejam, mengamuk, membunuh, berkhianat, membakar, dan dengki, (15) Cenderung bermalas-malas akibat alam yang murah hati. (16) Masih kuatnya ikatan saling tolong, (17) Manusia Indonesia pada dasarnya berhati lembut, suka damai, punya rasa humor, serta dapat tertawa dalam penderitaan, (18) Manusia Indonesia juga cepat belajar dan punya otak encer serta mudah dilatih keterampilan, (19) Punya ikatan kekeluargaan yang mesra serta penyabar

Berbagai sikap mental sebagaimana yang telah terurai di atas, harus benar-benar dapat dijadikan dasar berpijak dalam membangun masyarakat, artinya ciri-ciri sikap mental yang kurang baik/buruk seyogyanya mulai ditinggalkan, sedangkan yang baik dikembangkan dan dijadikan modal sosial dalam mengangkat citra kehidupan bersama.

Membangun berbagai elemen yang ada dalam modal sosial

Cara yang dapat dikembangkan adalah dengan menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara anggota masyarakat; menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara organisasi dengan warga masyarakat; menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar kelompok masyarakat ; serta menumbuhkan kerjasama dan ke-

percayaannya antara pemerintah masyarakat dan lembaga/instansi non pemerintah.

Melaksanakan sebuah Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Perlunya penciptaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governement*) ini merupakan jawaban atas prasangka dan tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah berada di titik nadir terendah, karena telah memandang rendah (*inferior*) terhadap keberadaan masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari setiap anggota masyarakat, khususnya masyarakat miskin, maka setiap program pemerintah yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan akan sia-sia saja atau tidak mampu memberdayakan dan mengangkat citra masyarakat menjadi mandiri. Oleh karena itu *Good Governance* harus dibangun atas landasan yang kuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam kapasitasnya sebagai organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dan kebijakan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, maka pemerintah harus menggandeng pihak-pihak yang senantiasa terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan, diantaranya adalah sektor dunia usaha dan sektor masyarakat. Sehingga ada tiga kawasan atau domain yang harus menumbuhkan semangat kerjasama antar anggota masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diantara 3 (tiga) kawasan atau domain yang dimaksud adalah pihak pemerintah; pihak dunia usaha; dan (3) pihak masyarakat itu sendiri.

Sebagai prwujudan dari pelaksanaan *Good Governemen*, maka masing-masing domain harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya didalam birokrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat maupun pelayanan publik. Dalam hal ini pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang baik; Swasta berfungsi menciptakan lapangan pekerjaan dan pihak ,masyarakat berfungsi menciptakan Interaksi sosial,

Sedangkan fungsi pokok birokrasi dalam bidang pemerintahan adalah menggali, mengelola; mengatur (regulasi); Pemerataan (*distributive*); Menandai (*symbolic*); Pertanggungjawaban (*responsive*), dan melakukan kerjasama lokal dan internasional, serta malakukan pembangunan/

pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Dalam bidang pembangunan atau pemberdayaan birokrasi berfungsi melakukan Pemerataan (*distributive*); Menandai (*symbolic*); Pertanggungjawaban (*responsive*), dan melakukan Kerjasama lokal dan internasional; serta dalam pelayanan publik berfungsi Menciptakan keadilan (*social politik*) dalam masyarakat,

PENUTUP

Berdasarkan pada kajian di atas, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemiskinan adalah sebuah fenomena sosial yang tidak wajar dan tidak manusiawi Oleh karena itu diperlukan peran serta semua elemen masyarakat, terutama yang memiliki berbagai kelebihan, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi/rezeki; kekuasaan, maupun yang lainnya.
2. Kemiskinan penduduk yang terjadi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kawasan miskin dan keluarga miskin, yang diakibatkan oleh berbagai faktor, baik, karena sumber daya alamnya, sumber daya manusia, kesehatan, kemampuan kepribadian maupun yang lainnya. Oleh karena proses pengentasannya haruslah bersifat holistik/ menyeluruh.
3. Modal Sosial yang berupa seperangkat daya yang bersandar pada nilai-nilai sosial masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan untuk sarana pengentasan kemiskinan, karena denan nilai-nilai itu dapat dibangun dan ditumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat, kerjasama dan jaringan sosial yang mampu membangkitkan dan memotivasi seseorang (orang miskin) bangkit dari keterpurukannya menuju tataran kehidupan yang lebih layak
4. Ada tiga rasionalisasi penggunaan modal sosial sebagai sebuah pendekatan dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu (1). Memberikan pencerahan tentang makna kepercayaan, kebersamaan, toleransi dan partisipasi sebagai sebuah pilar penting dalam pembangunan masyarakat, (2) Modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, akan tetapi malah semakin meningkat dan (3) Modal sosial

dapat memelihara norma-norma sosial dalam suatu komunitas dan mengurangi kecenderungan perilaku egois diantara anggota kelompok

5. Untuk meningkatkan modal sosial sebagai solusi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni (1) melakukan perubahan terhadap mindset dan culturalset; (2) Membangun berbagai elemen yang ada dalam modal sosial, dan (3) Melaksanakan sebuah Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, 2005, Pemberdayaan Pemuda Melalui Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pertukangan Kayu, Thesis tidak diterbitkan, Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003, Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) Dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- Lubis, Mochtar, 1993, Budaya, Masyarakat dan Manusia Indonesia, Yayasan Obor Indonesia.
- Pranaji, Tri, 2006, Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24 No. 2, : 178-206